

Perkuat Sektor Logistik, Pemerintah Dorong Penataan Ekosistem Logistik Melalui Penerapan NLE



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

HM.4.6/253/SET.M.EKON.3/07/2023

Perkuat Sektor Logistik, Pemerintah Dorong Penataan Ekosistem Logistik Melalui Penerapan NLE

Jakarta, 18 Juli 2023

Memasuki Triwulan III-2023, perekonomian nasional hingga kini terus menunjukkan eksistensi positif dengan berbagai capaian kinerja fundamental yang solid. Capaian tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Q1-2023 yang sebesar 5,03%, tingkat inflasi bulan Juni yang terkendali pada angka 3,52, surplus transaksi berjalan Q1-2023 sebesar 0,8% dari PDB, serta diikuti dengan pertumbuhan positif sejumlah indikator perekonomian seperti PMI Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, hingga investasi.

Meski demikian, Pemerintah juga tetap antisipatif dalam merespons ketidakpastian global pada berbagai sektor yang mampu mempengaruhi kinerja perekonomian, salah satunya pada sektor logistik sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja sektor logistik tersebut ditunjukkan oleh capaian *Logistics Performance Index* (LPI) yang pada tahun 2023 sendiri menempati skor sebesar 3,00.

“LPI merupakan alat ukur kita di dalam mengidentifikasi tantangan peluang di dalam logistik perdagangan kemudian beberapa yang diukur ini sebenarnya berdasarkan survei-survei terhadap para pelaku usaha,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat menyampaikan sambutan dalam acara Bincang Stranas PK: Kok Bisa Rapor Logistik Turun Saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia, pada Selasa (18/07) di Kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Capaian LPI tahun 2023 tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 3,15, disebabkan oleh menurunnya indikator penilaian yang memerlukan partisipasi pihak swasta seperti kompetensi dan kualitas layanan logistik, kemampuan *tracking* dan *tracing*, kemudahan layanan pengapalan ke Indonesia, serta frekuensi kesesuaian jadwal waktu barang diterima. Sedangkan indikator penilaian yang menjadi kontrol Pemerintah seperti efisiensi proses *clearance* oleh Lembaga Pengendali Perbatasan dan kualitas infrastruktur pendukung menunjukkan kinerja yang baik.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah menilai perlu dilakukan upaya penataan ekosistem logistik melalui penerapan *National Logistics Ecosystem* (NLE). NLE merupakan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak berkaitan dengan arus logistik barang, sistem perbankan, sistem transportasi pergudangan, dan entitas-entitas lainnya yang termasuk di dalam NLE.

Telah diimplementasikan secara bertahap hingga 46 pelabuhan pada tahun 2023, penerapan NLE tersebut didasarkan pada empat pilar utama yakni perbaikan layanan Pemerintah di bidang logistik melalui simplifikasi proses bisnis berbasis elektronik, kolaborasi sistem layanan logistik antar pelaku kegiatan logistik, kemudahan dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik, dan penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi.

“Dengan penerapan NLE ini menjadi salah satu inisiatif Pemerintah di bidang logistik yang bisa menjangkau berbagai indikator di LPI tadi, sehingga kalau NLE ini bisa 100% kita mandatorikan dan bisa efektif, mudah-mudahan bisa memperbaiki keenam indikator LPI tadi,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan upaya lain untuk meningkatkan kinerja LPI Indonesia melalui berbagai kebijakan mulai dari menyelesaikan tindak lanjut hasil Rakortas Menteri terkait NLE, memperkuat kebijakan dalam Standarisasi Layanan Kepelabuhanan, mendorong perbaikan kinerja Perusahaan Kurir dan Pos, penyempurnaan regulasi, proses bisnis dan sistem terkait implementasi Lartas, API-P & API-U, dan Neraca Komoditas, hingga sosialisasi aturan dan kebijakan kepada pelaku usaha logistik internasional dan domestik.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ketua KPK, Deputy bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Deputy Bidang Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator bidang perekonomian, Direktur Utama Pelindo, Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, serta Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW. (dft/rtn/fsr)

**Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto**

Website: www.ekon.go.id

Twitter, Instagram, Thread, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia